

PENGARUH ANGGARAN BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN
INDUSTRI DI INDONESIA



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Raka Mahendra

Nomor Mahasiswa : 08312050

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PENGARUH ANGGARAN BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Muhammad Raka Mahendra
Nomor Mahasiswa : 08312050

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta 21 Mei 2012

Penulis,



Muhammad Raka Mahendra

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh Dosen pembimbing skripsi

dengan judul:

**PENGARUH ANGGARAN BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA**

Dijjukan oleh

Nama : Muhammad Raka Mahendra

Nomor Mahasiswa : 08312050

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 10 Mei 2012

Dosen pembimbing,



Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.si.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881346 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Pada Semester Genap 2011/2012, Hari Jumat, 8 Juni 2012 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh:

Nama : **MULIAMMAD RAKA MAHENDRA**
No. Mahasiswa : 08312050
Judul Tugas akhir : Pengaruh Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan:

1. Lulus Ujian Tugas Akhir

- a. ~~Tugas akhir tidak direvisi~~
- b. ~~Tugas akhir perlu direvisi~~

~~2. Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir~~

Nilai : A
Pembimbing : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si
Tim Penguji
Ketua : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak
Anggota : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Yogyakarta, 8 Juni 2012
Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. Isti Bahayu, M.Si, Ak

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

- Bagi yang telah lulus Ujian Tugas akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi di Divisi Akademik

Mulai Menyusun tugas akhir : Semester Ganjil 2011/2012

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN

BERITA ACARA REVISI TUGAS AKHIR

Pada tanggal di bawah ini telah dilaksanakan ujian tugas akhir atas:

Nama : MUHAMMAD RAKA MAHENDRA

No. Mahasiswa : 08312050

Materi tugas akhir yang direvisi/diperbaiki:

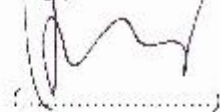
Halaman Hal hal yang perlu diperbaiki

	Data diberi satuan dr data ybs Lampirkan hasil uji asumsi klasik

Tugas akhir tersebut di atas : Diuji lagi/ Tidak diuji lagi*


Tanggal, 8 Juni 2012

Penguji



(.....)

Pembimbing,



Drs. Kesit Bambang Prakosa, V.Si

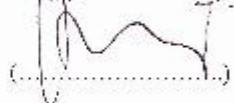
Telah dibimbing/revisi/diperbaiki Tgl: 14/6/2012

Pembimbing,



Drs. Kesit Bambang Prakosa, V.Si

Pengaji,



(.....)

Catatan:

- Waktu revisi 2 (dua) bulan, lebih dari 2 bulan, ketulusan dianggap gugur dan tugas akhir diuji lagi.

Setelah selesai bimbingan revisi, segera diserahkan ke Divisi Akademik.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

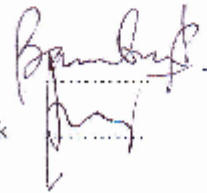
Pengaruh Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia

Disusun Oleh: MUHAMMAD RAKA MAHENDRA
Nomor Mahasiswa: 08312050

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 8 Juni 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Kesil Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si, Ak



Mengesahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Prof. Dr. Haeni Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO

- ❖ *“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya.”*
(Al-Baqarah 286)
- ❖ *“Barangsiapa yang kehilangan sifat ramahnya, maka ia telah kehilangan kebaikan (dalam dirinya).”*
(HR, Muslim)
- ❖ *“Barangsiapa mencari ridha Allah meskipun mendatangkan kemarahan umat manusia, maka Allah akan menjaga dan mencukupinya, sehingga ia tidak bergantung pada pemberian manusia. Dan barangsiapa mencari pujian manusia dengan mendatangkan kemarahan Allah, maka Allah akan meninggalkannya, sehingga ia akan bergantung pada manusia.”*
(HR, Al-Tirmidzi)
- ❖ *Tuhan bisa memakai kelemahanmu untuk sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu*
(Wilkanandi)
- ❖ *jika engkau kesulitan dalam pekerjaanmu, jangan berputus asa, jangan gelisah dan jangan ragu. Kamu akan bisa melakukan apapun, jika kamu percaya bahwa kamu bisa*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:



Terima kasih atas limpahan rahmat dan ridhomu, karunia dan kemuliaanmu ya Allah...

Bapak, Ibu, a andri, teteh lies, teteh fanie, a dani, a leppi, teteh cisca, ayi dan seluruh keluarga besar yang tercinta..

Orang-orang yang pernah menjadi bagian kehidupan saya, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, Terima kasih...



Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis. Serta salam dan shalawat bagi junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "PENGARUH ANGGARAN BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat beberapa hambatan dan kesulitan, namun berkat semangat, ketekunan, kerja keras, dan do'a serta adanya dorongan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangan, serta penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan senantiasa diterima dengan lapang dada untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan dan bantuan berbagai pihak atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta memberikan dorongan moral dan material kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Edy Suandi Hamid, Dr.,M.Ec, Prof. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma,. MBA, selaku Dekan FE UII Yogyakarta.
4. Bapak Kesit Bambang Prakosa,Drs.,M.si. selaku dosen pembimbing, dengan penuh kesabaran dan perhatiannya yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rifqi Muhammad, SE, M.Sc, SAS. yang telah memberikan kesempatan selaku pembimbing akademik.
6. Ibu Isti Rahayu, Dra.,M.Si, Ak. Selaku ketua jurusan akuntansi yang telah banyak memberikan masukan sehingga bisa sampai saat ini.
7. Bapak dan Ibu dosen FE UII yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman serta telah membantu kelancaran skripsi ini.
8. Segenap karyawan dan karyawan FE UII, terutama bagian perpustakaan dan referensi yang senantiasa memberikan dan menyediakan keperluan bacaan dan peminjaman buku yang menunjang penyusunan skripsi ini.

9. Kakak-kakak dan adik ku, Andri Ilham Nurdin SE, dr Fanie Nur Indriani, dr Leppi Agung Wahyudi, M.Rayi Mahendri. Serta kakak-kakak Ipar ku Lies Ratna Suminar SE, dr Dani Sagitha, dr Francisca Primadona yang telah memberikan do'a, bantuan, dukungan dan kasih sayangnya.
10. Keponakan – keponakan Tampan kk Fadli, Daffa, Raffa, Raffi yang memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan kuliah.
11. Adik kembaran ku yang saling mensupport dalam perkuliahan maupun hal lainnya.
12. Teman-teman yang telah banyak membantu ku hari, kiwil ,hageng, ristono, jawa, dean, juki, ipul, hendra, ipan, condro, ajik , krecek, afu, andri, udi, rohmat, fairuz.
13. Detected: Mada, Nohan, Anna, Depoy, Maya, Rayi, Bersama kita satu !
hahaa
14. Keluarga Besar HMJA(Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi) KOMISI FE UII tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan berbagai macam pengalaman.
15. Para Kerabat KKN unit 42 : pak pijay,om untung, ozi, abdi, riza, mbah, yofi, mita, tika, desy, ira yang udah ngajarin banyak hal selama di Ngemplak-wukirsari Cangkringan.

16. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusiapun yang sempurna, hanya Allah Yang Maha Sempurna atas segala ciptaan-Nya. Untuk itulah penulis mengharapkan adanya kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta.....2012

Muhammad Raka Mahendra

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan Skripsi	i
Halaman Judul Skripsi	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	7

1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II Kajian Pustaka

2.1 Teori Keagenan	9
2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.4 Anggaran Belanja Modal	17
2.5 Industri	18
2.6 Pendapatan Asli Daerah	22
2.7 Dana Alokasi Umum	23
2.8 Kerangka Berpikir	24
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
2.10 Hipotesis Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Sampel Penelitian	34
3.2 Jenis Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34

3.4 Definisi Operasional Variabel	35
3.5 Metode Analisis Data	37

BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pengolahan Data	45
4.1.1 Uji Normalitas Data	45
4.1.2 Uji Heterokedastisitas	47
4.1.3 Uji Multikolinieritas	48
4.1.4 Uji autokorelasi	49
4.2 Hasil Analisis	50
4.2.1 Analisis Regresi Linear berganda	50
4.2.2 Pengujian Hipotesis	51
4.2.3 Pengujian Regresi Secara Simultan	53
4.2.4 Pengujian Koefisien Determinasi	54
4.3 Pembahasan	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pengukuran Autokorelasi.....	44
4.1 Analisis Multikolinieritas.....	48
4.2 Hasil Tes Durbin .Watson.....	49
4.3 Pengukuran Auto Korelasi.....	49
4.4 Hasil Uji Secara Parsial.....	51
4.5 Hasil Pengujian Secara Simultan.....	53
4.6 Model Summary.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24
4.1 Analisis Normalitas.....	46
4.2 Analisis Heterokedastitas.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rekapitulasi Data	66
2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo,2002). Tujuan organisasi khususnya organisasi sektor publik antara lain adalah meningkatkan pelayanan. Prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik adalah aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya, contohnya infrastruktur publik seperti jalan, pasar, dan lain-lain.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 yaitu mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam pembangunan daerahnya. Kesulitan – kesulitan tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi serta ditangani oleh pemerintah daerah dengan kembali memikirkan mengenai strategi – strategi pembangunan yang harus dilakukan. Strategi pembangunan tersebut menyangkut peranan pemerintah dalam perekonomian di luar pasar. Karena kekuatan pasar sendiri tidak akan berjalan sempurna apabila tidak mengikutsertakan campur tangan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

Tantangan yang dihadapi suatu daerah terutama untuk daerah otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangatlah diperlukan. Arah penentu kebijakan dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria – kriteria prioritas pembangunan salah satunya berupa peningkatan investasi disuatu daerah, dengan meningkatnya investasi maka dampaknya akan mendorong pertumbuhan pada segala sektor dan akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hubungan antara pertumbuhan industri dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan industri dalam jangka panjang (Sodik, 2007). Pengeluaran pemerintah pada sektor publik ini dapat dilihat dari jumlah belanja modal yang terdapat di realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing – masing daerah. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS, 2009). Keseluruhan belanja modal tersebut merupakan infrastruktur yang digunakan oleh daerah. Ketersediaan infrastruktur tersebut penting bagi suatu daerah untuk menarik investor masuk, karena seringkali hambatan investasi terjadi bukan karena terbatasnya pasar atau kekurangan bahan mentah ataupun tenaga kerja melainkan karena terbatasnya jenis prasarana atau infrastruktur yang ada di daerah tersebut (Sukirno, 1985).

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan

berujung pada peningkatan kemandirian daerah. peningkatan PAD akan menyebabkan peningkatan infrastruktur industri. Dengan infrastruktur industri yang baik, menyebabkan investor mau untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Namun potensi fiscal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bias jadi sangat beragam. Di sini peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan menjadi penting.

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Kenyataan bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiscal yang beragam, juga mempengaruhi pertumbuhan industri masing-masing daerah.

Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikutnya yakni disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pihak Pemerintah Daerah akan membuat rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007).

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000 dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai prinsipal membuat suatu kontrak dengan Pemerintah Daerah sebagai agen dengan harapan bahwa agen akan bertindak melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan

jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Proses pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang syarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani (2003); Ablo dan Reinikka (1998) dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah anggaran belanja modal (BM) berpengaruh terhadap pertumbuhan industri?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan industri?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan industri?

4. Apakah anggaran belanja modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan industri?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh anggaran belanja modal (BM) terhadap pertumbuhan industri.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan industri.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan industri.
4. Variabel yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan industri.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu akuntansi yang didapat dibangku kuliah dengan kehidupan nyata dilapangan.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para mahasiswa lain sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh anggaran belanja modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan industri.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan industri.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yaitu,

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan titik tolak penulisan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan secara rinci landasan teori yang meliputi landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan model empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menganalisis dan membahas masalah yang diteliti mengenai pengaruh anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap Pertumbuhan industri di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Praktik senjangan anggaran dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya. Teori keagenan dikembangkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling dalam Latuheru (2005).

Jensen dan Meckling dalam Latuheru (2005) menyebutkan dalam hubungan ini mencakup pula pelimpahan wewenang dalam pembuatan keputusan dari prinsipal kepada agen dengan tujuan agar manajemen memaksimalkan nilai perusahaan yang berarti menaikkan kesejahteraan para pemegang saham. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (prinsipal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen), yang melakukan pekerjaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (prinsipal/investor) dan pengendalian (agen/manajer). prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan apa yang diharapkan dari uang yang telah dikeluarkan. Jika kedua belah pihak dalam hubungan ini mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, dapat dipastikan agen tidak

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal inilah yang sering disebut dengan konflik kepentingan. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerjasama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Menurut Eisenhardt dalam Darmawati dkk (2005) teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul ketika (1) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (2) prinsipal mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.

Berkaitan dengan masalah keagenan, partisipasi dan kesenjangan anggaran yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan bahwa atasan tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang ada pada pemerintah, dan berkaitan dengan bagaimana para bawahan mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, Darmawati dkk, 2005).

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal akan memicu terjadinya biaya yang disebut biaya keagenan. Jensen dan Meckling

dalam Latuheru (2005) mendefinisikan biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya bonding (*bonding cost*), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen melaksanakan sesuai dengan kontraknya.
- c. Kerugian residual (*residual loss*), yang merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Namun munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya keagenan (Jensen dan Meckling, dalam Latuheru, 2005). Biaya keagenan tersebut dapat dikurangi dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- a) Memberikan atau memperbesar peran manajemen di dalam perusahaan (*insider stakeholders*). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan bawahan dengan atasan. Dengan adanya peran ini pihak manajemen merasa ikut memiliki dan merasakan langsung dari hasil

keputusan yang diambil. Dengan demikian, bawahan merupakan insentif bagi pihak manajemen dalam meningkatkan komitmen organisasi.

- b) Pendekatan pengawasan dengan menggunakan hutang. Menurut Jensen dan Meckling dalam Latuheru (2005) dengan peningkatan penggunaan hutang dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan *free cash flow* secara berlebihan oleh manajemen. Grossman dan Hart dalam Latuheru (2005) menyatakan bahwa penggunaan hutang juga akan meningkatkan kemungkinan risiko kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan (*job loss*), sehingga memberikan motivasi kepada manajer untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi perusahaan.
- c) Kepemilikan institusional (*institutional investors*) sebagai agen pengawas (*monitoring agents*). Moh'd dkk (1998) menyatakan bahwa bentuk distribusi anggaran pada pemerintah dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai organisasi. bawahan biasanya sebagai *large stakeholders* memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan terhadap manajer pengelola daripada kepala daerah.

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi agents mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuannya yang sesungguhnya, adanya asimetri informasi di antara eksekutif dan legislative menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Moe (1984) dan Srtom (2000) dalam Abdullah dan Asmara (2006) hubungan keagenan dalam

penganggaran publik adalah antara (1) pemilih-legislator, (2) legislator-pemerintah, (3) menteri keuangan-pengguna anggaran.

2.2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrument perencanaan, pengawasan, dan fungsi stabilisasi karena APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

2.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
- (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- (5) penyusunan rancangan perda APBD;

(6) penetapan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. PAD
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemda yang bersangkutan dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemda kota maupun kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Realisasi PAD antar kota atau kabupaten setiap tahunnya dapat bervariasi, karena potensi setiap pos penerimaannya juga mengalami perkembangan. Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau badan jasa yang nyata dari pemda, seperti pelayanan pekerjaan, pertukaran barang, atau ijin yang dikeluarkan oleh pemda. Pungutan ini dikenakan atas kegiatan untuk memperoleh manfaat tertentu dan pemda berkepentingan untuk mengadakan pengawasan atas kegiatan tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh

daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja menurut kelompoknya terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

2.4. Anggaran Belanja Modal

Anggaran belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya (Mardiasmo, 2002). Menurut Halim (2004a: 73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003: 36) juga menyatakan menyatakan

hal senada. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992).

Belanja modal , meliputi:

1. Belanja Tanah,
2. Belanja Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Gedung dan Bangunan,
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Belanja Aset Tetap Lainnya,
6. Belanja Aset Lainnya (Mahmudi, 2006).

2.5. Industri

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya

terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Dumairy,1996).

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.

Menurut Hadikusumo (1990) pengertian industri adalah:

“Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bagian dari suatu barang (*assembling*)”.

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery,1986).

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*.

Berdasarkan pengalaman di hampir semua negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

a. Industri Besar Sedang

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi Sembilan sub sektor. Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar.

b. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Dalam rangka menunjang pembangunan disektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga.

Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka

kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor.

Dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

c. Industri Kecil Dan Menengah

Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/ tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manajemen juga lebih maju.

Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran.

2.6. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2002). Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pada organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik karena melibatkan pihak legislatif. Tidak demikian pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik yang tidak diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya

tujuan organisasi.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

2.7. Dana Alokasi Umum

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini karena selama pemerintahan orde baru hasil SDA lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat (Devas, 1989).

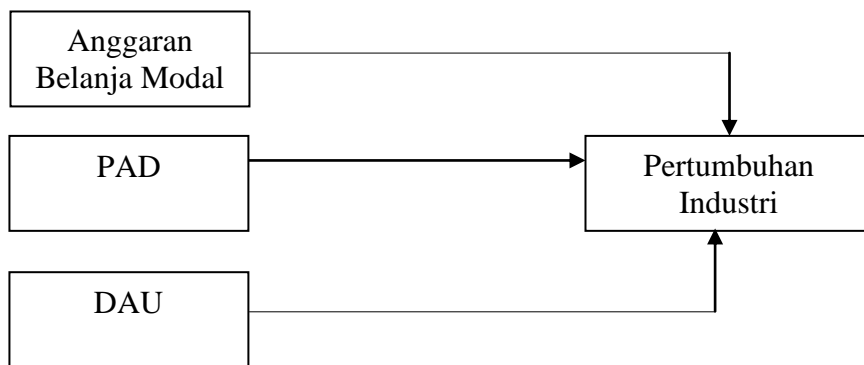
Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Walaupun Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak merata di seluruh daerah. Daerah kaya SDA misalnya Riau, Kalimantan Timur, Aceh, dan Irian Jaya akan mendapatkan dana bagi hasil yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang

miskin sumber daya alam. Pada sisi yang lain Jakarta dan kota besar lainnya akan memperoleh dana bagi hasil pajak (PBB, BPHTB, dan PPh) yang cukup besar, sebagai konsekuensi terkonsentrasinya pusat bisnis di kota metropolitan.

Fenomena seperti ini akan berdampak terhadap meningkatnya ketimpangan fiskal antar daerah, yang pada akhirnya melalui kebijakan ekspansi pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan antardaerah dan wilayah.

2.8. Kerangka Berpikir

Model penelitian yang dipakai berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan seperti gambar berikut:



Gambar 2.1; Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan mempengaruhi Pertumbuhan Industri di Indonesia.

2.9. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap variabel *belanja modal*. Variabel *PAD* memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel *DAU* memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abrar (2010) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan industri Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi. Penelitian ini menemukan (i) *PAD* berkembang dengan tren yang negatif setiap tahunnya; (ii) pertumbuhan industri provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga bergerak pada arah yang negatif dengan pertumbuhan rata-rata pertahun 2,84 persen; (iii) Hubungan *PAD* dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadrat yang perlu diwaspadai posisinya di masa depan karena pada data tahun terakhir telah menunjukkan kondisi yang semakin menurun; dan (iv) Hubungan Belanja pembangunan dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadrat yang perlu diwaspadai posisinya di masa depan walaupun pada data tahun terakhir telah menunjukkan kondisi yang puncak. Jika belanja ini tidak dimanfaatkan kepada kegiatan ekonomi produktif maka dikhawatirkan akan mengalami dampak negatif bagi pertumbuhan industri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan persamaan pada;

1. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum
2. Alat Analisis yang digunakan

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) yaitu Sampel yang digunakan pada penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari sampelnya adalah anggaran belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali, dengan tahun pengamatan 2004 – 2005. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen pertumbuhan industri dan menempatkan variabel belanja modal sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah seluruh propinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan yang diperpanjang dari tahun 2006 hingga 2010

2.7. Hipotesis Penelitian

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang

lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan industri adalah proses kenaikan *output* dari industri (Boediono, 1985 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Secara tradisional, pertumbuhan industri ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan dan menghasilkan Produk Domestik Regional Daerah / PDRD (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004, dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu 2000, dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates ,1995; Lin dan Liu 2000, yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004, dalam Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Hasil penelitian oleh Darwanto dan Yulia Kartikasari (2007) menunjukkan bahwa antara variabel pertumbuhan industri dan variabel belanja modal mempunyai pengaruh yang positif. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

Ha1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Industri

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan industri daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari – harinya secara aman dan nyaman. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya

investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan industri yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi (kontribusi) industri melalui pajak terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Wong (2004) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Adi (2006) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri yang berakibat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) dalam David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) menunjukkan adanya pengaruh yang kuat peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan industri. Hipotesis yang dikembangkan pemaparan ini adalah sebagai berikut :

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Industri.

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al., dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat

keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah untuk sektor industri. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Industri.

Dalam perspektif teori keagenan, Inman dan Rubinfeld dalam Adi (2006), menyatakan agen (*agent*) atau politisi dipemerintahan daerah bersikap seolah-olah mereka memaksimalkan utilitas individu (*voter*) berpendapat menengah ke bawah di dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan belanja publik untuk periode tertentu, agen akan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya berdasarkan ekspektasinya terhadap lingkungan ekonomi pada masa yang akan datang. Secara teoritis diasumsikan bahwa semua pengeluaran pada periode tertentu tergantung pada ketersediannya sumber daya pada periode yang bersangkutan, namun dengan batasan aturan anggaran yang ada, misalnya anggaran berimbang (*balanced-budget rule*).

Dalam konsep anggaran berimbang pemda diharuskan menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, tetapi tidak mengatur bagaimana pengeluaran harus diprioritaskan atau

bagaimana komponen-komponen pengeluaran ditentukan (Holzt-Eakin et al, dalam Adi, 2006). Oleh karena itu pemda dapat melakukan *smoothing* atas pengeluaran-pengeluarannya karena memang tidak ada aturan yang secara efektif digunakan untuk mencegahnya. Hal itu juga terjadi di Norwegia (Aaberge & Langorgen, dalam Adi (2006), dimana kebebasan untuk membuat prioritas atas pengeluaran untuk melayani masyarakatnya, meskipun tidak mutlak. Menurut Inamn dalam Adi (2006), pembuatan dalam sektor publik *backward-looking*. Disisi lain, *time horizon* agen lebih panjang dari satu tahun anggaran, sehingga pada praktiknya beberapa pemda membentuk *rainy day finds* untuk memudahkan atas pengeluarannya atau menyusun anggaran untuk siklus beberapa (*multiyear budget*).

Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2006) tentang Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, sayangnya pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD nya pun kecil. Selain itu untuk belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dapat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Anggaran belanja modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan industri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber dan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002). Sampel pada penelitian ini adalah pemerintah daerah di 32 propinsi se Indonesia dari tahun 2006-2010 dengan alasan ketersediaan data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli (Husein, 2001). Jenis data yang dikumpulkan adalah jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan pertumbuhan industri.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diperoleh dan dikumpulkan dari hasil yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *secondary data*, yaitu metode pengumpulan data yang berupa tulisan, salinan atau berbagai literatur yang dipublikasikan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Laporan realisasi APBD kabupaten se Kabupaten dan kota se Indonesia tahun 2006-2010 digunakan untuk melihat nilai belanja modal, DAU, Pendapatan asli daerah dan pertumbuhan industri.

3.4. Definisi operasional variabel

a) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal diukur dari total penjumlahan belanja modal pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Data ini diperoleh dari publikasi BPS dari tahun 2006-2010.

b) Pertumbuhan Industri

Analisis yang dilakukan terhadap pertumbuhan industri bermanfaat produk domestik bruto (PDB), tren pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta nilai ekspor hasil industri.

. Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro, 2004 dalam Adi, 2007):

$$\text{Pertumbuhan Industri} = \frac{JI_t - JI_{t-1}}{JI_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

JI_t = Jumlah Industri pada tahun t

JI_{t-1} = Jumlah Industri satu tahun sebelum tahun t

Data ini diperoleh dari dari publikasi BPS dari tahun 2006-2010

c) Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. PAD diukur dari total penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Data ini diperoleh dari dari publikasi BPS dari tahun 2006-2010.

d) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya

alam yang dimilikinya. Data ini diperoleh dari dari publikasi BPS dari tahun 2006-2010

3.5. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang belanja modal, PAD, DAU, dan Pertumbuhan industri dengan membandingkan dari masing masing.

b. Analisis Statistik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dibandingkan rata-ratanya terdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujiannya untuk menentukan jenis alat uji hipotesis dalam penelitian, apakah alat uji statistik parametrik atau nonparametrik. Apabila data terdistribusi normal maka digunakan statistik parametrik, sedangkan apabila dari hasil pengujian didapatkan distribusi yang tidak normal maka akan digunakan statistik nonparametrik (Djarwanto, 1996). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov*. Jika didapatkan nilai probabilitas di atas 0,05 maka data dapat dikatakan distribusi sampel adalah normal.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan metode statistik regresi berganda (*multiple regression*). Pendekatan ini diadopsi dari Schoonhoven (1981) yang juga digunakan oleh Chia (1995) diikuti dalam Latuheru (2005), seperti pada persamaan (1) untuk menguji hipotesis pertama sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + e$$

di mana:

Y = Pertumbuhan Industri (PI)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

Pertumbuhan Industri merupakan variabel dependen diprediksi dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, yaitu: belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penggunaan pendekatan interaksi bertujuan untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan industri dipengaruhi oleh interaksi antara belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Fokus utama persamaan regresi pada

penelitian ini adalah pada signifikan indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi variabel independen (komitmen organisasi) terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran

3. Metode Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka perlu dilakukan uji statistik berupa Uji t, Uji F dan koefisien determinasi (R)

a) Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual dan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain konstan/tetap.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0 : b_1 = 0$
- $H_a : b_1 > 0$
- Nilai t tabel

t tabel ; $t_{\alpha ; n-k}$

dimana :

α = Adalah derajat signifikansi

n = Adalah jumlah sampel

k = Adalah banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta

Kriteria pengujian :

- Apabila nilai t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- Apabila nilai t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

b) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut :

- $H_0 : b_1 = b_2$
- $H_a : b_1 \neq b_2$
- Nilai F tabel

F tabel ; $F_{\alpha} ; k-1 ; n-k$

dimana :

α = Adalah derajat signifikansi

n = Adalah jumlah observasi

k = Adalah banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta

- Nilai F hitung :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)}$$

dimana :

R^2 = Adalah koeffisien determinasi

N = Adalah jumlah sampel (observasi)

K = Adalah banyaknya parameter/koeffisien regresi plus konstanta

Kriteria pengujian :

- Apabila nilai F hitung < F tabel, maka H_0 diterima, artinya semua koeffisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf signifikan (5%).
- Apabila nilai F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak, artinya semua koeffisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikan (5%).

c) Koeffisien Determinasi R^2

Koeffisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel dependen.

4. Uji Asumsi Klasik

Gujarati (1999: 86) menyatakan bahwa terdapat atau tidak penyimpangan asumsi klasik yang dapat terjadi dalam penggunaan model Regresi Linier Berganda yaitu Multikolinieritas, Heteroskedasitas dan Autokorelasi, oleh karena itu perlu dideteksi terlebih dahulu kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut, dengan menggunakan:

a. Uji Multikolinieritas

Menurut Singgih (2000: 97) Multikolinieritas adalah menguji apakah pada model Regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas.

Salah satu cara untuk mendeteksi terjadi Multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai-nilai VIF atau angka toleransi hasil olahan data dengan menggunakan SPSS For Windows versi 15.00. Peluangnya apabila nilai VIF di sekitar 1 atau angka toleransi mendekati 1 maka variabel tersebut tidak akan mempunyai masalah Multikolinieritas (Singgih, 2000 : 97). Angka toleransi untuk Multikolinieritas adalah sebesar 0.80, jadi meskipun semua variabel saling berkolinieritas kalau nilainya dibawah 0.80 maka Multikolinieritas tidak dianggap masalah, analisis tetap dilakukan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan residual melalui satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso, 2002: 208). Dengan kata lain pengujian ini dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Scatter Plot*. Metode ini dapat dilakukan dengan melihat grafik. jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk satu pola. tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). maka disinyalir telah terjadi Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu cara mengatasi masalah Heteroskedastisitas adalah melakukan transformasi log, karena transformasi log linier akan mengurangi situasi Heteroskedastisitas, dalam hal ini transformasi log akan memperkecil skala ukuran variabel.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Singgih (2000: 99) Autokorelasi adalah adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) atau adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu ruang (Gujarati, 1999: 89) yang mempengaruhi terjadinya korelasi serial adalah sebagai berikut :

1. Data observasi dimulai dari suatu kelesuan sehingga data observasi yang menarik jelas dipengaruhi data sebelumnya.
2. Tidak memasukkan variabel bebas tertentu yang sebelumnya turut mempengaruhi variabel terikat.
3. Bentuk model yang tidak tepat

Untuk menguji apakah hasil-hasil estimasi model regresi tersebut tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya, maka dipergunakan *Durbin Watson Statistik*, yaitu dengan melihat koefisien korelasi *Durbin Watson*, adapun cara mendeteksi terjadi Autokorelasi dengan menggunakan tabel 1 seperti yang dikemukakan Algifari (2000: 8).

Tabel 3.1
Pengukuran Autokorelasi

Durbin Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 sampai dengan 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 sampai dengan 2,34	Tidak ada Autokorelasi
2,34 sampai dengan 2,92	Tanpa korelasi
Lebih dari 2,92	Ada korelasi

Sumber: Algifari, 2000

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas analisa statistik mengenai pengaruh anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan industri dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda pada *software* spss 15, dimana anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum menjadi variabel bebas, sedangkan pertumbuhan industri menjadi variabel terikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pusat dan sumber lain yang terkait, dengan obyek yang diteliti dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam, anggaran belanja modal (BM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan Pertumbuhan Industri (PI) Manufaktur semua propinsi di seluruh Indonesia.

4.1. Pengolahan Data

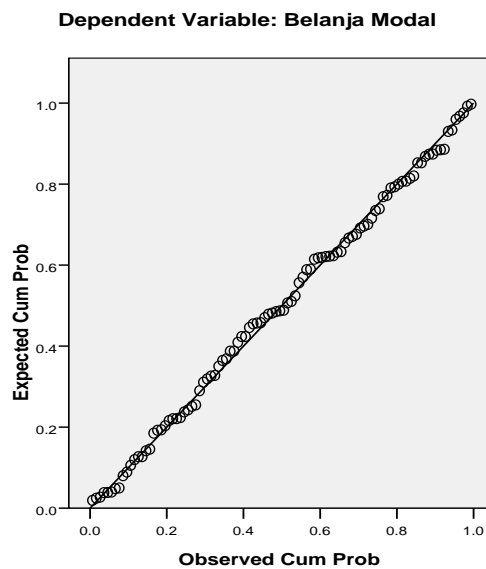
4.1.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi

normal. Berdasarkan uji yang penulis lakukan mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa keduanya mempunyai distribusi normal karena berada pada garis diagonal.

Gambar 4.1
Analisis Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

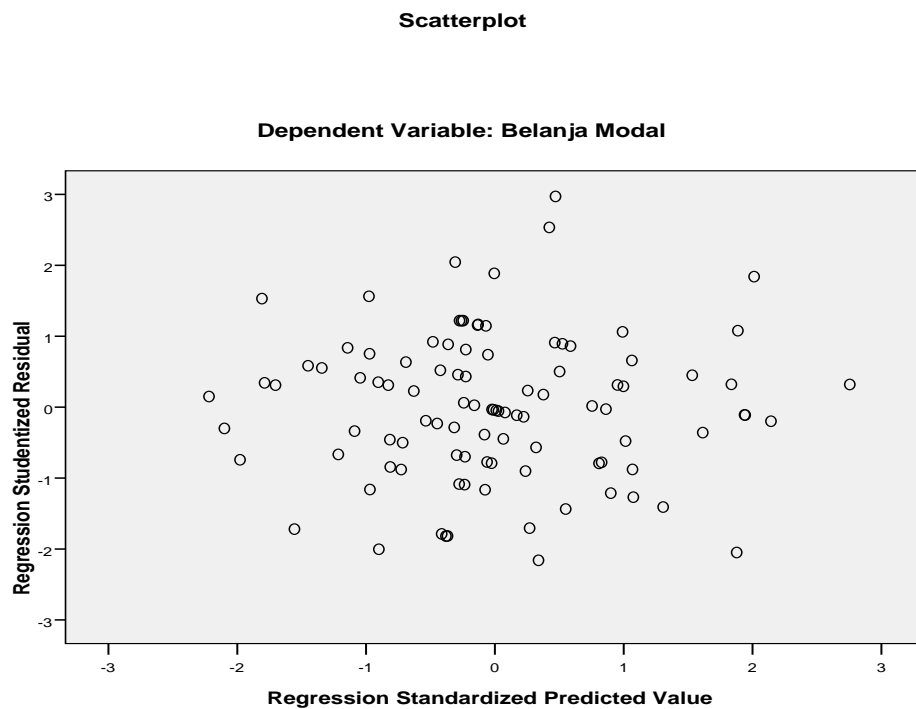


Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa grafik normal probability plot menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar di sekitar grafik normal. Dimana titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis dengan grafik plots. Metode ini dapat dilakukan dengan melihat grafik, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk satu pola tertentu yang teratur, maka disinyalir telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatter plot* sbb :

Gambar 4.2
Analisis Heterokedastitas



Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value*. Jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Tabel 4.1
Analisis Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Belanja Modal	0,831	1,203	Tidak ada Multikolinieritas
PAD	0,834	1,200	Tidak ada Multikolinieritas
DAU	0,988	1,012	Tidak ada Multikolinealitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ pada persamaan regresi linier. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program komputer SPSS diperoleh nilai DW sebesar 1,836.

Tabel 4.2
Hasil Tes Durbin Watson

	K=3	
N	dl	du
100	1,61	1,74

Berdasarkan tabel 4.2, maka dapat disusun tabel pengukuran autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengukuran Autokorelasi

Dw	Kesimpulan
Kurang dari 1,61	Ada autokorelasi
1,61 sampai dengan 1,74	Tanpa kesimpulan
1,74 sampai dengan 2,26	Tidak ada autokorelasi
2,26 sampai dengan 2,39	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,39	Ada autokorelasi

Berdasarkan output SPSS 15.0 nilai DW sebesar 1,836, nilai ini dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel >100 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa angka DW (1,836) berada diantara du (1,74) sampai dengan 4-du (2,26) yang artinya tidak ada autokorelasi.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah regresi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk mendapatkan persamaan regresi, diperoleh hasil sebagai berikut,

$$a = 14,994$$

$$b_1 = 0,512$$

$$b_2 = 0,564$$

$$b_3 = 0,363$$

Jadi persamaan garis regresinya adalah:

$$\mathbf{PI = 14,994 + 0,512X_1 + 0,564 X_2 + 0,363 X_3}$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 14,994, yang berarti bila variabel BM, PAD dan DAU (X) nol, maka nilai pertumbuhan industri (Y) pada propinsi di Indonesia adalah sebesar 14,994

- b. X1 (BM) naik sebesar 1%, maka pertumbuhan industri (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,512 dengan anggapan X₂ dan X₃ adalah tetap.
- c. X2 (PAD) naik sebesar 1%, maka pertumbuhan industri (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,564 dengan anggapan X₁ dan X₃ adalah tetap.
- d. X3 (DAU) naik sebesar 1%, maka pertumbuhan industri (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,363 dengan anggapan X₁ dan X₂ adalah tetap.

Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara belanja modal, PAD dan DAU terhadap pertumbuhan industri, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

4.2.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat hasil pengujian regresi secara parsial, yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara BM, PAD, dan DAU yang signifikan terhadap pertumbuhan industri secara parsial, hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4
Hasil uji secara parsial

Variabel	T-test	Signifikansi	Keterangan
BM	3,460	0,003	Ha diterima, Ho ditolak
PAD	4,057	0,000	Ha diterima, Ho ditolak
DAU	2,534	0,016	Ha diterima, Ho ditolak

Sumber; data Sekunder diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan industri (hipotesis pertama)

Dengan Tingkat signifikansi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak karena nilai t hitung (3,460) berada pada daerah penerimaan H_a dimana tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau $0,003 < 0,05$. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan industri.

- b. Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan industri (hipotesis kedua)

Dengan Tingkat signifikansi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai t hitung (4,057) berada pada daerah penerimaan H_a dimana tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dengan pertumbuhan industri.

- c. Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan industri (hipotesis ketiga)

Dengan Tingkat signifikansi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai t hitung (2,534) berada pada daerah penerimaan H_a dimana tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau $0,016 < 0,05$. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dengan pertumbuhan industri.

4.2.3. Pengujian Regresi Secara Simultan

Dari hasil Regresi Berganda dapat diketahui bahwa pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan untuk mengetahui apakah korelasi dari garis regresi tersebut signifikan atau tidak maka perlu dilakukan suatu pengujian. Uji koefisien regresi serentak (uji F) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 15, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil pengujian secara simultan

Model	Summary of square	Df	Mean Square	F	Signifikan
Regression	348,985	3	116,328	5,859	.000
Residual	31966,866	161	198,552		
Total	32315,851	164			

Sumber : data Sekunder diolah 2012

Dari tabel 4.5 diketahui nilai probabilitas F_{hitung} sebesar 0,000, karena signifikansi F hitung $< 0,05$ maka BM, PAD, dan DAU (X), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri (Y).

4.2.4. Pengujian Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Hasil pengujian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 4.6
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,739	0,546	0,518	1,091

Sumber : data Sekunder diolah 2012

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,546 yang berarti model dapat menjelaskan variasi BM, PAD, dan DAU sebesar 54,6 persen dan sisanya sebesar 45,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti pinjaman, bantuan pemerintah pusat, dan lain-lain.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara BM, PAD dan DAU terhadap pertumbuhan industri propinsi seluruh Indonesia dengan besar koefisien regresi BM adalah sebesar 0,512, untuk PAD sebesar 0,564, dan DAU sebesar 0,363, yang menunjukkan angka positif artinya pengaruh yang terjadi antara BM, PAD, dan DAU terhadap pertumbuhan industri di Indonesia adalah positif. Tingkat signifikansi dari

masing-masing variabel X adalah sebesar 0,003 untuk BM, untuk PAD sebesar 0,000, sedangkan untuk DAU sebesar 0,016, yang lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05 yang berarti pengaruh yang terjadi terhadap pertumbuhan industri adalah sangat signifikan. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima, dimana hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2006) yang membahas tentang Hubungan Antara Pertumbuhan industri, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, dimana Priyo Hari Adi dalam penelitiannya menemukan bahwa bahwa PAD mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan industri. Selain itu untuk belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan industri maupun pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wong (2004), dimana wong menemukan bahwa pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Darwanto, dkk (2007), dimana Darwanto, dkk menemukan bahwa BM, PAD, dan DAU berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan industri, tetapi Darwanto tidak mampu membuktikan pengaruh belanja modal secara signifikan terhadap pertumbuhan industri. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abrar (2010) yang membahas mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan industri Provinsi Aceh, dimana Abrar (2010) menemukan PAD berkembang dengan tren yang negatif setiap tahunnya; pertumbuhan industri provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga bergerak pada arah yang negatif;

Hubungan PAD dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadratik; dan hubungan belanja pembangunan dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadratik.

Dalam pengaruh BM, PAD, dan DAU yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri, hendaknya pemerintah-pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan industri lebih memprioritaskan belanja modal dengan cara melihat sumber pendapatan potensial yang dapat digali pada daerahnya masing-masing.

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Industri

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif anggaran belanja modal terhadap Pertumbuhan Industri. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan industri yang saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor belanja pembangunan daerah. Semakin besar belanja modal maka akan meningkatkan Pertumbuhan Industri di Indonesia.

Berdasarkan teori terdapat lima belanja modal yaitu, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan bangunan, dan belanja modal fisik lainnya, kelima variabel belanja modal tersebut mempengaruhi pertumbuhan Industri berdasarkan sektornya, misalnya sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan yang sangat mempengaruhinya adalah belanja jalan, irigasi dan bangunan. Realitas ini mendukung temuan Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pertumbuhan industri ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri manufaktur

meningkatnya presentase belanja pembangunan Pemda dibandingkan sebelum desentralisasi memberikan indikasi adanya kesungguhan Pemda untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kenyataan ini sejalan dengan temuan Lin dan Liu (2000) yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara *share* belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pada berbagai infrastruktur produktif. Tetapi tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abrar (2010) dimana hubungan belanja pembangunan dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadratik dan bergerak negatif. Berdasarkan pernyataan di atas maka hipotesis pertama dapat diterima.

2. Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Industri

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan industri. Temuan ini membuktikan bahwa apabila PAD meningkat maka pertumbuhan industri juga meningkat. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain PAD akan meningkatkan pertumbuhan industri, karena PAD merupakan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga secara teoritis apabila PAD besar maka daerah tersebut juga akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang kemudian akan meningkatkan belanja pembangunan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri sehingga temuan dalam penelitian ini akan mendukung teori yang ada.

Temuan ini juga sejalan dengan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD merupakan hubungan langsung dari belanja modal. Sependapat dengan ini bapenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif dengan kenaikan belanja pembangunan, artinya setiap terjadi kenaikan belanja pembangunan itu dipengaruhi oleh kenaikan PAD. Tidak efektifnya berbagai perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan aktifitas investasi yang akan memberikan tambahan pada peningkatan PAD. Peningkatan infrastruktur umum akan dapat menarik para investor dalam menanamkan modalnya, sehingga akan meningkatkan industri di propinsi tersebut, yang berujung pada peningkatan PAD. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis kedua dapat diterima. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abrar (2010) dimana Hubungan PAD dengan pertumbuhan industri menunjukkan fungsi kuadrat, dan PAD bergerak negatif.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Industri

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara dana alokasi umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Industri. Temuan ini membuktikan bahwa apabila DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat. DAU yang mempunyai

tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah akan meningkatkan belanja modal, karena DAU merupakan kebijakan bagi hasil sumber daya alam (SDA) dengan harapan masyarakat daerah dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimilikinya, hal ini juga berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian, sehingga secara teoritis apabila DAU meningkat maka perekonomian rakyat akan meningkat, yang secara langsung masyarakat daerah tersebut juga akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang kemudian akan meningkatkan belanja pembangunan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan industri sehingga temuan dalam penelitian ini akan mendukung teori yang ada.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa DAU memiliki korelasi (hubungan) yang nyata dengan pertumbuhan industri dan hubungannya adalah positif. Hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa DAU sangat berperan dalam meningkatkan belanja pembangunan yang berujung pada pertumbuhan industri.

4. Pengaruh BM, PAD, dan DAU Terhadap Pertumbuhan Industri

Dari hasil regresi diketahui bahwa tingkat signifikan uji F adalah sebesar 0,000 dimana lebih kecil daripada 0,05 artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara BM, PAD dan DAU terhadap pertumbuhan industri provinsi yang artinya BM, PAD dan DAU secara bersama-sama

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa BM, PAD dan DAU secara nyata mempengaruhi pertumbuhan industri, karena belanja modal akan menunjang peningkatan pertumbuhan industri, hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PAD merupakan variabel yang mendukung pemasukan pemerintah daerah dimana akan digunakan pada belanja modal yang diperuntukkan bagi industri, sehingga untuk menarik investor masuk ke daerah tersebut butuh infrastruktur yang mendukung, pembangunan infrastruktur ini butuh biaya yang diambil dari PAD. DAU merupakan sistem bagi hasil dimana akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan meminimalisir ketimpangan yang terjadi antara pusat dan daerah, yang menyebabkan pembangunan menjadi merata, untuk melakukan pembangunan ini dibutuhkan belanja modal. Belanja modal digunakan untuk menarik investor agar menginvestasikan uangnya pada sektor-sektor yang ditawarkan oleh Pemerintah propinsi, sementara itu belanja modal berasal dari pemasukan pemerintah daerah yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU, belanja modal daerah ini akan tercapai melalui investor. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat hubungan dan pengaruh yang nyata antara belanja modal, PAD, dan DAU pemerintah terhadap pertumbuhan industri. Dengan asumsi semakin besar BM maka dapat dipastikan PAD-nya juga tinggi, dengan PAD yang tinggi maka kondisi fiscal daerah tersebut akan lebih baik, semua hal inilah yang akan menyebabkan peningkatan atas pertumbuhan industri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan industri manufaktur (PI) yang ditunjukkan oleh angka koefisien regresi sebesar 0,512 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 dimana lebih kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan.
2. Untuk pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara PAD dengan pertumbuhan industri manufaktur yang ditunjukkan oleh angka koefisien regresi sebesar 0,564 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan.
3. Untuk pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara DAU dengan pertumbuhan industri manufaktur yang ditunjukkan oleh angka koefisien regresi sebesar 0,363 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 dimana lebih kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan.
4. Untuk pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara BM, PAD, dan DAU dengan

pertumbuhan industri manufaktur secara bersama-sama yang ditunjukkan oleh angka F hitung sebesar 5,859 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan.

5. *R-square* sebesar 0,546 yang berarti model dapat menjelaskan variasi BM, PAD, dan DAU sebesar 54,6 persen dan sisanya sebesar 45,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti pinjaman, bantuan pemerintah pusat, dan lain-lain

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisis sebelumnya maka penulis menyarankan;

1. Faktor pertumbuhan industri sangat ditentukan oleh BM, PAD, dan DAU. Meningkatnya BM, PAD, dan DAU, maka akan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur propinsi seluruh Indonesia, oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertumbuhan industri manufaktur daerah.
2. Pemerintah perlu mengetahui sektor pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi prioritas yang perlu dikembangkan dan dibangun, sehingga biaya belanja modal tidak menjadi sia-sia.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode pengamatan merupakan periode yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dalam hal ini adalah kondisi negara yang tidak stabil seperti ekonomi makro, kondisi politik, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, dan lain-lain.
2. Penelitian tidak membahas persektor ekonomi sehingga tidak dapat dilihat sektor mana yang lebih mempengaruhi pertumbuhan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2005, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kolom1.asp?kolom1>
- Adi, Priyo Haridan Harianto, D., 2007, Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Prociding Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bland, Lewis & Nunn, Daniel P. 2002. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. *Research Triangle Institute*. North Carolina. Working Paper.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Devas, Eckhard. 1989. Germany Reforming Federal Fiscal Relation. *Organization for Economics Development*. The OECD Observer.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK STIE YO*. Yogyakarta. Hal : 127-146.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.

- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munir, Sukmalana. 2003. *Ekonomi Mikro*. Penerbit Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 1999a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, MP. 2000. *Economic Development*. Sixth Edition. Published by New York University.

LAMPIRAN I; REKAPITULASI DATA

Tahun	Nama Propinsi	BM	PAD	DAU	PI
2006	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	349513	198432.4	76124	12.27
	Propinsi Sumatra Utara	321672	1143128.73	319741	17.07
	Propinsi Sumatra Barat	104951	375074.87	246818	7.89
	Propinsi Riau	749942	710384.05	61628	11.04
	Propinsi Jambi	172578	287637.72	223347	23.97
	Propinsi Sumatra Selatan	472133	493173.95	224874	3.45
	Propinsi Bengkulu	54809	103611.49	222618	10.23
	Propinsi Lampung	90762	410682.09	286822	6.06
	Propinsi DKI	3E+06	6430334.81	927249.86	21.63
	Propinsi Jawa Barat	359233	2846800.73	573778	27.75
	Propinsi Jawa Tengah	250315	1865390.53	553064	18.96
	Propinsi DIY	100627	347410.07	248049	10.62
	Propinsi Jawa Timur	446060	2860561.59	463328	3.84
	Propinsi Kalimantan Barat	59108	372381.45	739921	7.11
	Propinsi Kalimantan Tengah	149828	415827.9	273559.44	12.36
	Propinsi Kalimantan Selatan	164892	364181.39	209678.99	17.58
	Propinsi Kalimantan Timur	469517	705451.21	266775	3.81
	Propinsi Sulawesi Utara	14432	147139.84	220626	11.16
	Propinsi Sulawesi Tengah	44372	122907.88	258145	8.55
	Propinsi Sulawesi Selatan	113098	563613.15	313614	6.09
	Propinsi Sulawesi Tenggara	38962	382913.4	418279.8	8.7
	Propinsi Bali	67436	559689.36	192805.72	10.41
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	49626	170222.97	231537	7.68
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	50944	123690.37	305474	13.53
	Propinsi Maluku	77017	57507.69	272417.75	8.1
	Propinsi Papua	568046	162101.86	369929.58	5.19
	Propinsi Maluku Utara	37260	431920.8	537789.7	1.98
	Propinsi Banten	144303	818246.38	187863	1.2
	Propinsi Bangka Belitung	83539	114461.63	170227	15.99
	Propinsi Gorontalo	66841	37821.92	210712	8.01
	Propinsi Kepulauan Riau	109641	621338.9	1824435.5	11.88
	Propinsi Papua Barat	36508	210712	89063.24	19.89
	Propinsi Sulawesi Barat	162444	476128.4	489381	-6.51

*BM,PAD,DAU = Dalam Jutaan Rupiah

*PI = Dalam %

Tahun	Nama Propinsi	BM	PAD	DAU	PI
2007	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	312378	262119.99	271147	7.5
	Propinsi Sumatra Utara	307597	1372982.70	313745	2.4
	Propinsi Sumatra Barat	111172	448279.02	247487	2.82
	Propinsi Riau	1E+06	769561.7	92157	-5.49
	Propinsi Jambi	231110	344880.74	243618	16.47
	propinsi Sumatra Selatan	283535	590860.84	242707	3.6
	Propinsi Bengkulu	26734	122165.59	230653	18.15
	Propinsi Lampung	119927	549657.85	310835	1.71
	Propinsi DKI	3E+06	7597867.92	773023.9	0.42
	Propinsi Jawa Barat	414802	3604767.57	570660	4.83
	Propinsi Jawa Tengah	297465	2490643.74	549956	3.12
	Propinsi DIY	124502	401912.34	238692	10.68
	Propinsi Jawa Timur	492758	3464580.02	454635	2.04
	Propinsi Kalimantan Barat	70091	295462.27	312572	34.74
	Propinsi Kalimantan Tengah	168269	152092.83	287575.61	37.74
	Propinsi Kalimantan Selatan	137961	530110.53	238366.97	1.38
	Propinsi Kalimantan Timur	521547	897515.82	265592	16.14
	Propinsi Sulawesi Utara	26579	199131.94	247873	-1.53
	Propinsi Sulawesi Tengah	44244	141349.36	271756	2.37
	Propinsi Sulawesi Selatan	226698	675857.27	332725	19.11
	Propinsi Sulawesi Tenggara	75617	102688.67	254152	28.86
	Propinsi Bali	74551	742886.07	199924	4.47
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	72501	196615.34	249887	-18.15
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	70997	140648.94	305473.97	22.92
	Propinsi Maluku	101345	77357.82	279055	18.6
	Propinsi Papua	398145	198626.71	418866.94	4.71
	Propinsi Maluku Utara	39993	26933.24	229229.89	36.06
	Propinsi Banten	242920	1070237.77	198018	26.07
	Propinsi Bangka Belitung	115757	188304.37	187358	-6.78
	Propinsi Gorontalo	66961	46173.07	211012.99	11.64
	Propinsi Kepulauan Riau	1E+06	732991.7	1428290.7	19.35
	Propinsi Papua Barat	43529	12806.78	128243	15.21
	Propinsi Sulawesi Barat	206935	6234441.2	517726.9	14.07

*BM,PAD,DAU = Dalam Jutaan Rupiah

*PI = Dalam %

Tahun	Nama Propinsi	BM	PAD	DAU	PI
2008	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	405621	476759.97	460881	9.36
	Propinsi Sumatra Utara	2E+06	2200791.62	8333576	16.05
	Propinsi Sumatra Barat	185135	868893.64	5128700	-3.93
	Propinsi Riau	458534	1645085.67	3855208.81	31.3
	Propinsi Jambi	1E+06	546343.75	2473229.99	7.8
	Propinsi Sumatra Selatan	2E+06	1089675.68	4250578	20.13
	Propinsi Bengkulu	107312	232120.59	1994019	39.18
	Propinsi Lampung	246134	799970.78	4261520.5	16.74
	Propinsi DKI	848225	7799278.79	773024.1	35.43
	Propinsi Jawa Barat	164806	4058381.68	2019343	37.02
	Propinsi Jawa Tengah	311999	4551099.28	15159115.98	19.79
	Propinsi DIY	27643	732528.13	2452463	30.49
	Propinsi Jawa Timur	4E+06	5873852.55	16616761	11.85
	Propinsi Kalimantan Barat	140876	532116.68	4077278.53	56.1
	Propinsi Kalimantan Tengah	388192	410254.74	4373819	40.29
	Propinsi Kalimantan Selatan	177749	916671.2	3360322.73	6
	Propinsi Kalimantan Timur	4E+06	1828972.72	2313181.83	24.66
	Propinsi Sulawesi Utara	520182	331893.9	2759168.13	-1.86
	Propinsi Sulawesi Tengah	300227	282374.04	3262791.98	2.28
	Propinsi Sulawesi Selatan	246838	1290967.21	6236938	7.41
	Propinsi Sulawesi Tenggara	692516	247256.66	2892729.05	49.77
	Propinsi Bali	637300	1430606.93	2854128	3.33
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	576645	441020.34	2998811	20.19
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	151972	420605.55	4529411	12.4
	Propinsi Maluku	726948	143769.54	2309569	40.38
	Propinsi Papua	2E+06	430914.95	6721743.99	49.47
	Propinsi Maluku Utara	108836	122828.23	1882812.67	28.48
	Propinsi Banten	1E+06	1764579.79	2704950	24.03
	Propinsi Bangka Belitung	88708	340135.86	1468390	18.78
	Propinsi Gorontalo	68375	117592.26	1198082	19.44
	Propinsi Kepulauan Riau	172469	586125.68	1042334.69	21.45
	Propinsi Papua Barat	1E+06	70541.3	2214335.79	-6.48
	Propinsi Sulawesi Barat	284320	472918.3	619247.34	16.66

*BM,PAD,DAU = Dalam Jutaan Rupiah

*PI = Dalam %

Tahun	Nama Propinsi	BM	PAD	DAU	PI
2009	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	111718	563106.08	487934	13.8
	Propinsi Sumatra Utara	5E+06	2231223.63	9511977	10.83
	Propinsi Sumatra Barat	2E+06	861021.69	5779338	6.84
	Propinsi Riau	9E+06	1691632.74	2629743.4	19.14
	Propinsi Jambi	2E+06	558820.5	3133539	-4.56
	Propinsi Sumatra Selatan	5E+06	1223671.93	4947823	3.15
	Propinsi Bengkulu	1E+06	303547.5	2549504	32.32
	Propinsi Lampung	2E+06	761228.14	4758145	8.97
	Propinsi DKI	980915	10084255.25	119943	45.45
	Propinsi Jawa Barat	6E+06	5726869.46	15733154	13.11
	Propinsi Jawa Tengah	5E+06	4776119.91	17385324.98	9.06
	Propinsi DIY	596738	716508.69	2704390	21.27
	Propinsi Jawa Timur	7E+06	5494890.55	18677133.16	9.3
	Propinsi Kalimantan Barat	2E+06	585882.32	5079784	42.6
	Propinsi Kalimantan Tengah	3E+06	421025.27	4824177.45	5.82
	Propinsi Kalimantan Selatan	2E+06	1036081.11	3740130.2	16.41
	Propinsi Kalimantan Timur	1E+07	1520267.5	3017915	5.28
	Propinsi Sulawesi Utara	1E+06	356992.74	3071594	3
	Propinsi Sulawesi Tengah	2E+06	270782.12	3612224	23.64
	Propinsi Sulawesi Selatan	4E+06	1386124.09	7351809	31.11
	Propinsi Sulawesi Tenggara	2E+06	273723.76	3243449	15.75
	Propinsi Bali	1E+06	3292774	3292774	21.9
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	1E+06	512093.88	3478868	2.79
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	2E+06	427386.09	5059365	24.03
	Propinsi Maluku	1E+06	171528.37	2782040	16.5
	Propinsi Papua	7E+06	424277.12	7863577	7.65
	Propinsi Maluku Utara	1E+06	113619.61	2149093	-6.51
	Propinsi Banten	2E+06	1881245.12	3261181	25.62
	Propinsi Bangka Belitung	1E+06	347192.92	1736834	15.12
	Propinsi Gorontalo	725965	135929.77	1420658	15.11
	Propinsi Kepulauan Riau	2E+06	60009473	1397194	31.41
	Propinsi Papua Barat	2E+06	70392.33	3152165	44.64
	Propinsi Sulawesi Barat	3E+06	523364.86	336312	7.02

*BM,PAD,DAU = Dalam Jutaan Rupiah

*PI = Dalam %

Tahun	Nama propinsi	BM	PAD	DAU	PI
2010	Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4E+06	795710	557327	24.6
	Propinsi Sumatra Utara	4E+06	1897497	727911	17.96
	Propinsi Sumatra Barat	1E+06	592292	631676	34.59
	Propinsi Riau	9E+06	2459789	198375	61.62
	Propinsi Jambi	3E+06	406307	468804	14.64
	Propinsi Sumatra Selatan	5E+06	964675	545776	2.61
	Propinsi Bengkulu	1E+06	793625	10000	37.98
	Propinsi Lampung	2E+06	1498980	6330	72.96
	Propinsi DKI	2E+06	18761543	437785.4	31.23
	Propinsi Jawa Barat	5E+06	5685930	904232	16.89
	Propinsi Jawa Tengah	6E+06	4845226	1053492	21.81
	Propinsi DIY	805995	1083562	3100	19.41
	Propinsi Jawa Timur	7E+06	5303520	14145	24.87
	Propinsi Kalimantan Barat	2E+06	1286204	3000	14.16
	Propinsi Kalimantan Tengah	4E+06	1187658	670213	18.93
	Propinsi Kalimantan Selatan	3E+06	1382795	466549	37.02
	Propinsi Kalimantan Timur	1E+07	4040673	45200	9.63
	Propinsi Sulawesi Utara	2E+06	847279	532916	21.73
	Propinsi Sulawesi Tengah	2E+06	876334	42947	30.12
	Propinsi Sulawesi Selatan	4E+06	2022082	4000	8.52
	Propinsi Sulawesi Tenggara	2E+06	885292	566435	15.36
	Propinsi Bali	1E+06	1288985	448187	6.09
	Propinsi Nusa Tenggara Barat	2E+06	1034766	511286	20.4
	Propinsi Nusa Tenggara Timur	2E+06	916021	616602	22.77
	Propinsi Maluku	2E+06	775497	3000	18.06
	Propinsi Papua	7E+06	2263043	876295	9.75
	Propinsi Maluku Utara	2E+06	621472	451481	7.26
	Propinsi Banten	3E+06	2025871	3000	14.37
	Propinsi Bangka Belitung	1E+06	721945	342744	10.35
	Propinsi Gorontalo	1E+06	471941	391045	38.04
	Propinsi Kepulauan Riau	2E+06	1178500	368638	-1.8
	Propinsi Papua Barat	2E+06	780084	578084	28.56
	Propinsi Sulawesi Barat	3E+06	515902	349342	20.46

*BM,PAD,DAU = Dalam Jutaan Rupiah

*PI = Dalam %

LAMPIRAN II

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removed^p

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,739 ^a	,546	,518	1,09085	1,836

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	348,985	3	116,328	5,859	,000 ^a
	Residual	31966,866	161	198,552		
	Total	32315,851	164			

- a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,994	1,596		9,397	,000		
	Pendapatan Asli Daerah	,564	,185	,881	4,057	,000	,834	1,200
	Dana Alokasi Umum	,363	,362	,421	2,534	,016	,988	1,012
	Belanja Modal	,512	,289	,847	3,460	,003	,831	1,203

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
1	1	2,483	1,000	,06	,06	,05	,06
	2	,776	1,788	,01	,14	,63	,08
	3	,412	2,454	,20	,25	,03	,84
	4	,329	2,749	,73	,55	,30	,02

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

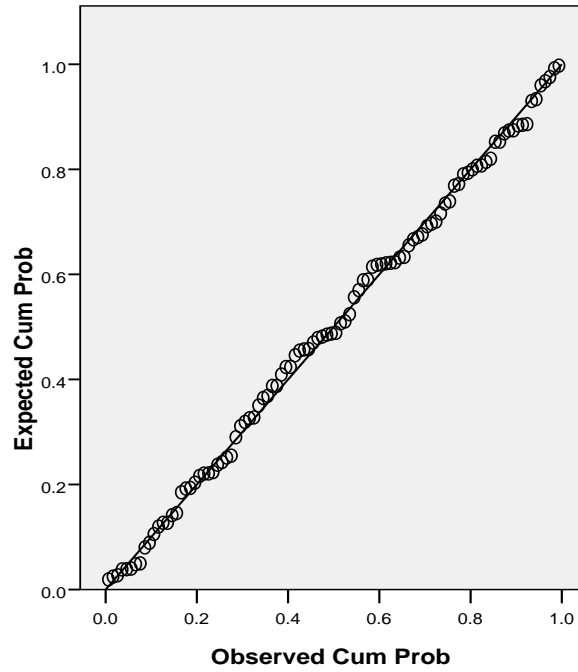
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	15,0262	23,2267	16,2135	1,45875	165
Std. Predicted Value	-,814	4,808	,000	1,000	165
Standard Error of Predicted Value	1,146	6,218	1,893	1,113	165
Adjusted Predicted Value	14,2142	25,9291	16,2568	1,70388	165
Residual	-33,26088	56,14994	,00000	13,96137	165
Std. Residual	-2,360	3,985	,000	,991	165
Stud. Residual	-2,374	4,004	-,001	1,003	165
Deleted Residual	-33,63565	56,69557	-,04328	14,32303	165
Stud. Deleted Residual	-2,409	4,207	,002	1,014	165
Mahal. Distance	,091	30,945	2,982	6,129	165
Cook's Distance	,000	,216	,007	,022	165
Centered Leverage Value	,001	,189	,018	,037	165

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Industri

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Modal



Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal

